

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dunia II (PD II) pada tahun 1945 menjadikan Amerika Serikat dan Uni Soviet kala itu sebagai dua negara kekuatan besar (*super power*) di dunia.¹ Sehingga pasca berakhirnya PD sistem global saat itu terbagi dalam dua polar kekuasaan (*bipolar*) yang diwakilkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara berkuasa baik dari segi militer, ekonomi, politik, budaya yang mempengaruhi kawasan sekitarnya dan juga dunia internasional.²

Oleh karena itu, munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mewakilkan sistem global *bipolar* memberikan pengaruh terhadap pengelompokan suatu negara, sehingga dunia terbagi menjadi dua polar kekuatan yakni Polar Barat atau yang sering dikenal sebagai Blok Barat diwakilkan oleh Amerika Serikat beserta aliansinya Kanada, Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Italia, Islandia, Luxemburg, Norwegia, Prancis, Portugal. Serta Polar Timur atau yang lebih dikenal dengan Blok Timur yang diwakilkan oleh Uni Soviet beserta negara aliansinya atau yang lebih dikenal dengan Negara Satelit yakni Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Polandia, Rumania, Hongaria. Adapun ideologi yang

¹ www.ilmuscial.com/2011/02/perang-dingin-dan-sejaranya.html?m=1

² Özkan, Gökhan. *Unipolar, Bipolar or Multipolar International System? The Defense Industry Factors*, hal. 105 - 106

dianut oleh negara – negara Blok Barat ini ialah liberal-kapitalis sedangkan negara – negara Blok Timur menganut ideologi komunis-sosialis.³

Gambar 1. 1. Peta Blok Timur atau Negara Satelit Soviet



Sumber: <http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/03/daily-chart-15>

Dengan berakhirnya PD II tak lantas permasalahan di antara negara – negara yang berkonflik telah usai, terlebih munculnya dua negara *super power* yang berpengaruh di dunia, serta perbedaan ideologi keduanya yang kemudian semakin menimbulkan perselisihan yang berakibat pada Perang Dingin di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet beserta negara aliansinya masing – masing. Perpecahan ini merupakan persaingan untuk menciptakan tatanan dunia yang damai di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet masing –masing berlomba untuk menunjukkan kekuatan negaranya masing melalui Perang Dingin pada tahun 1947 – 1991 yang ditandai dengan adanya perlombaan senjata, perimbangan kekuatan, dan ancaman perang nuklir.⁴

³ <http://www.britannica.com/topic/balance-of-power>

⁴ Fachrudji, A. 2005. *Rusia Baru menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hal. 164

Istilah Perang Dingin digunakan untuk menggambarkan ketegangan geopolitik antara Uni Soviet dan negara satelitnya dengan Amerika Serikat beserta Kanada, Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Italia, Islandia, Luxemburg, Norwegia, Prancis, Portugal, istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Bernard Baruch dan Walter Lippman yang merupakan seorang ahli keuangan Amerika Serikat serta seorang penasihat presiden untuk menggambarkan hubungan yang terjadi di antara kedua negara adikuasa tersebut.⁵

Selama berlangsungnya Perang Dingin, pihak Amerika Serikat kemudian membentuk sebuah pakta pertahanan di wilayah Eropa yang bertujuan untuk menjaga kebebasan dan keamanan negara – negara anggotanya dengan politik dan militer serta sebagai forum bagi Amerika Serikat dan Eropa dapat berkonsultasi bersama – sama pada bidang keamanan yang menjadi perhatian bersama di antara pihak – pihak terkait.⁶ Pakta Pertahanan bentukan Amerika Serikat dikenal sebagai NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara pada tahun 1949 serta didirikan oleh 12 negara anggota dari wilayah Eropa Barat, Eropa Utara, Eropa Selatan serta ditambah Amerika Utara di antaranya ialah; Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Italia, Islandia, Luxemburg, Norwegia, Prancis, dan Portugal.⁷

Demi mengimbangi kekuatan yang dimiliki Amerika Serikat, pihak Uni Soviet pun tak mau kalah, kemudian Uni Soviet mendirikan sebuah pakta pertahanan baru pada tahun 1955 yang dikenal dengan Pakta Warsawa (*Warsaw*

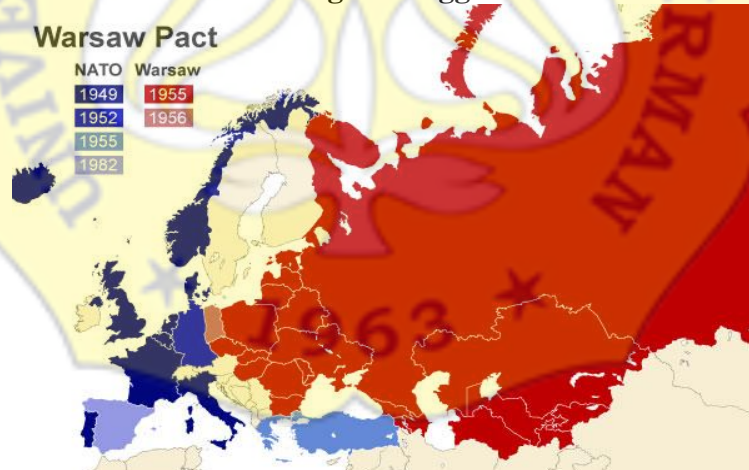
⁵ Gaddis, John Lewis. 2005. *The Cold War a New History*. New York: Penguin Press, hal 54

⁶ *Handbook NATO*. Brussels: Public Diplomacy Division NATO, hal 15 - 16

⁷ *Ibid*. hal 15 - 16

Pact). Adapun yang mendasari berdirinya Pakta Warsawa adalah bahwa berbagai negara penandatangan akan saling membantu terutama dalam isu – isu adanya agresi yang dilakukan oleh negara lain terhadap negara anggota Pakta Warsawa, hal ini terjadi dikarenakan terdapat kekhawatiran di antara negara anggota Pakta Warsawa bahwa negara – negara Barat, terutama setelah pembentukan NATO, memungkinkan untuk melakukan tindakan militer terhadap negara Blok Timur, serta merupakan perjanjian yang diperuntukkan mengadakan kerjasama politik dan militer bagi negara anggotanya.⁸ Pakta Warsawa sendiri memiliki beberapa negara anggota di antaranya ialah; Uni Soviet, Jerman Timur, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Hongaria, Polandia, dan Rumania, di mana negara – negara tersebut merupakan negara – negara yang terletak di wilayah Eropa Tengah.

Gambar 1. 2. Peta Negara Anggota Pakta Warsawa





Sumber:http://aventalearning.com/content168staging/2008AmHistB/unit11/html/section_6_page_15.html

Dengan adanya kedua pakta pertahanan tersebut dapat dipastikan bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan negara yang sangat berpengaruh di

⁸ *Op.Cit.* A. Fachrudji. 2005, hal. 168

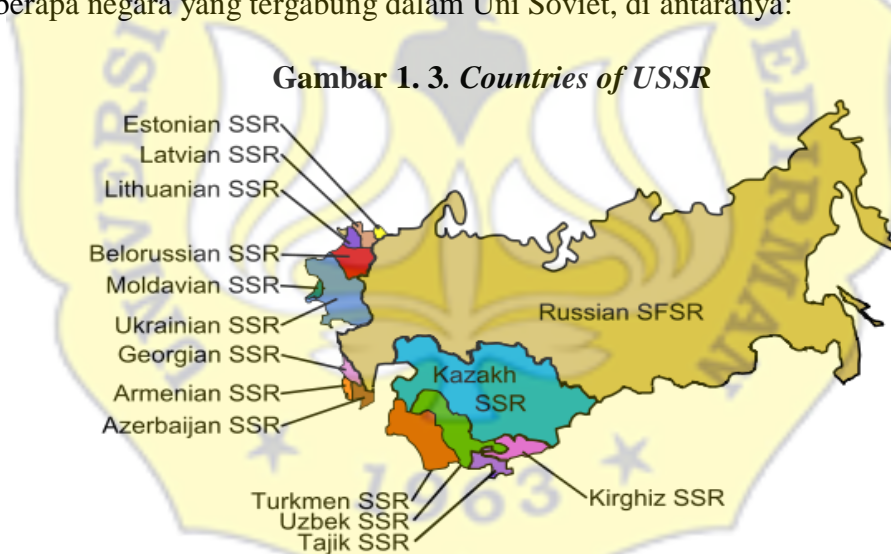
antara negara – negara aliansinya, sehingga pembentukan pakta pertahanan tersebut terkesan seperti adanya perlombaan untuk mencari aliansi – aliansi baru yang akan dijadikan sebagai pendukung kekuatan mereka. Demi membuktikan siapa negara yang paling berpengaruh NATO kemudian mulai memperluas wilayah aliansinya dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 1952, selanjutnya pada tahun 1955, 1982, 1990, 1999, 2004 dan 2009. Berikut tabel perluasan keanggotaan NATO dari tahun ke tahun:

Tabel 1. 1. NATO Enlargement Member Countries

<u>DATE</u>	<u>COUNTRY</u>	<u>ENLARGEMENT</u>
18 February 1952	 Greece	<i>First</i>
	 Turkey	
9 May 1955	 West Germany	<i>Second</i>
30 May 1982	 Spain	<i>Third</i>
3 October 1990	<i>German reunification</i>	
12 March 1999	 Czech Republic	<i>Fourth</i>
	 Hungary	
	 Poland	
29 March 2004	 Bulgaria	<i>Fifth</i>
	 Estonia	
	 Latvia	
	 Lithuania	
	 Romania	
	 Slovakia	
	 Slovenia	
1 April 2009	 Albania	<i>Sixth</i>

Sumber: Handbook NATO 2006

Pada tahun 1990 runtuhnya tembok Berlin menandai bahwa telah berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dimenangkan oleh Amerika Serikat.⁹ Kemudian pada tahun 1991 disusul dengan bubarnya Pakta Warsawa yang menjadi awal dari runtuhnya paham – paham komunisme di wilayah Eropa, serta semakin berkembangnya gelombang revolusi demokratik di wilayah Eropa Timur khususnya.¹⁰ Hal ini turut mengakhiri masa kekuasaan Uni Soviet serta terbaginya wilayah Uni Soviet dalam beberapa negara bagian, dengan runtuhnya Uni Soviet menjadikan Rusia sebagai negara bagian terbesar di Uni Soviet serta menjadi pewaris dari Uni Soviet.¹¹ Berikut peta yang menggambarkan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Soviet, di antaranya:



Sumber: <http://historyofrussia.org/countries-in-soviet-union/>

Bersamaan dengan bubarnya Pakta Warsawa menjadikan NATO sebagai pakta pertahanan satu – satunya di dunia internasional. Amerika Serikat sebagai

⁹ Permatasari, Mira. *Dampak Perluasan Keanggotaan NATO terhadap Hubungan NATO – Rusia*. (PDF) diakses pada

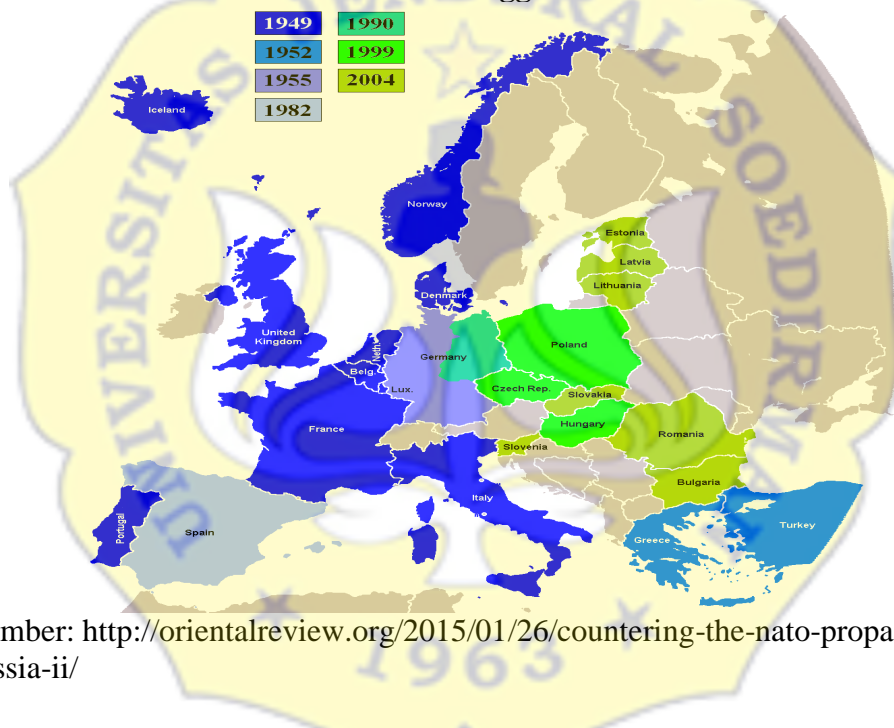
http://idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=78&limitstart=5 pada tanggal 11 Juli 2014 hal 2 - 3

¹⁰ <http://www.history.com/this-day-in-history/the-warsaw-pact-is-formed>

¹¹ *Op.Cit. A. Fachrudodji*. 2005, hal. 191 - 194

pemimpin negara-negara Barat terus mempertahankan NATO. Selain itu, adapun beberapa negara yang tergabung dalam Blok Timur turut bergabung menjadi anggota NATO, seperti Lithuania, Latvia, dan Estonia atau disebut juga sebagai Negara Baltik.¹² Berikut merupakan peta yang membuktikan bahwa dari tahun ke tahun ekspansi yang dilakukan NATO semakin mengarah pada wilayah Eropa Timur:

Gambar 1. 4. Peta Perluasan Keanggotaan NATO tahun 1949 – 2004



Sumber: <http://orientalreview.org/2015/01/26/countering-the-nato-propaganda-on-russia-ii/>

Dengan semakin banyaknya negara – negara di Eropa yang bergabung dengan NATO terlebih dengan bergabungnya Negara Baltik yang merupakan *near abroad* serta berbatasan langsung dengan Rusia dan juga merupakan pintu gerbang antara NATO dengan Rusia, Negara Baltik tersebut dianggap sebagai *red-line*. Dimana

¹² Negara Baltik, merupakan negara – negara di wilayah Eropa Timur yang letak geografis negaranya terletak bersebelahan dengan Laut Baltik, negara – negara tersebut ialah Latvia, Lithuania, dan Estonia

red-line sendiri merupakan sebuah batas guna memperingati NATO untuk tidak menembus batas tersebut. Karena Negara Baltik berbatasan langsung dengan Rusia, kemudian Rusia menganggap bergabungnya Negara Baltik ke dalam NATO sebagai sebuah ancaman bagi keamanan militer Rusia.¹³ Sehingga, Rusia kemudian menolak adanya perluasan keanggotaan NATO yang dilakukan secara sepihak, dengan demikian Rusia kemudian mengartikan kondisi tersebut sebagai bentuk tindakan yang dapat menghambat Rusia dalam memperoleh kembali pengaruhnya terhadap negara – negara *post-Soviet* dan berdampak pada semakin berkurangnya aliansi Rusia di Eropa.¹⁴

Oleh karena itu, Rusia menganggap dengan adanya ekspansi NATO di wilayah Eropa Timur khususnya wilayah Baltik akan memberikan dampak terhadap eksistensi Rusia di kawasan Baltik tersebut, terlebih dengan bergabungnya Negara Baltik ke dalam keanggotaan NATO pada tahun 2004. Menanggapi hal tersebut, Vladimir Putin yang menjabat sebagai Presiden Federasi Rusia memberikan respon melalui pembuatan politik luar negeri, kebijakan perekonomian Rusia, dan juga memperbaharui kebijakan modernisasi militer dalam bidang pertahanan yang mengedepankan kepentingan negara Rusia serta negara – negara CIS (*Commonwealth of Independent State*)¹⁵. Hal ini kemudian yang dianggap penting oleh penulis untuk dikaji untuk melihat bagaimana eksistensi Rusia di kawasan

¹³ Permatasari, Mira. 2011. *Dampak Perluasan Keanggotaan NATO terhadap Hubungan NATO-Rusia*. Universitas Pertahanan Indonesia, hal. 81.

¹⁴ Rogov, Sergey M., Hunter Robert E. *Engaging Russia as Partner and Participant; The Next Stage of NATO-Russia Relations*. http://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF203.html. (di akses pada 05 Januari 2015).

¹⁵ CIS (Commonwealth of Independent State), merupakan organisasi yang di bentuk oleh militer Rusia yang beranggotakan dari negara – negara *post-Soviet* yang berada di bawah pengaruh Rusia.

Baltik pasca bergabungnya Negara Baltik dalam ekspansi keanggotaan NATO, sehingga penulis mengangkat judul **“Implikasi Perluasan Keanggotaan NATO Terhadap Eksistensi Rusia di Wilayah Baltik Pada Masa Pemerintahan Vladimir Putin Tahun 2004 - 2008”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu **“Bagaimana implikasi perluasan keanggotaan NATO terhadap eksistensi Rusia di Eropa Timur Pada Masa Pemerintahan Vladimir Putin Tahun 2000 – 2008?”**

1.3. Hipotesis

Dengan bergabungnya Negara Baltik pada tahun 2004 dalam ekspansi keanggotaan NATO yang notabene merupakan negara – negara *post-Soviet*, yang merupakan merupakan *near abroad* bagi Rusia, akan mempersempit ruang gerak Rusia dalam melaksanakan kebijakan pertahanan Rusia di wilayah *post-Soviet* serta dalam melakukan hubungan kerja sama dengan negara – negara *post-Soviet* lainnya. Selain itu, kekhawatiran Rusia terhadap ekspansi NATO di wilayah Baltik akan memberikan dampak semakin berkurangnya aliansi Rusia di wilayah Eropa Timur sehingga akan berpengaruh terhadap eksistensi Rusia di kawasan tersebut.

1.4. Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis membatasi penelitian ini dengan membahas mengenai apa implikasi perluasan keanggotaan NATO terhadap eksistensi Rusia di kawasan Eropa Timur yakni dengan memahami pola hubungan kerja sama Rusia dengan beberapa Negara Baltik (Latvia, Lithuania, dan Estonia) sebelum adanya perluasan keanggotaan NATO dalam bidang politik, ekonomi maupun militer, serta hubungan kerja sama Rusia dengan negara Baltik pasca adanya ekspansi keanggotaan NATO di wilayah Eropa Timur.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam perkembangan ilmu hubungan internasional fokus kepentingan dunia tidak lagi berorientasikan pada perang dan militerisasi, melainkan pada ekonomi dan kepentingan nasional masing – masing negara. Namun saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa militer diperlukan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kepentingan negara dan mempertahankan pengaruh suatu negara terhadap negara lain.

1.5.1. Konsep *National Security* (Keamanan Nasional)

Istilah Keamanan Nasional merujuk kepada upaya untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara-bangsa dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki baik ekonomi, militer, kekuatan politik dan upaya – upaya diplomasi. Ketidakmampuan negara dalam menciptakan dan mempertahankan keamanan nasional nantinya akan mengancam rakyatnya. Keamanan nasional dapat tercipta apabila didukung oleh kapabilitas negara dalam menciptakan *good governance* atau *clean governance*, dan dalam

pembuatan kebijakan – kebijakan (*state policy*) yang menunjukkan respon negara terhadap ancaman yang dihadapinya.¹⁶

Adapun elemen – elemen utama dalam Keamanan Nasional, di antaranya:¹⁷

1. Kedaulatan (*Sovereignty*)

Snow mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuatan tertinggi (*supreme*) dan mandiri (*independent*). Snow membagi kedaulatan dalam dua istilah yakni politik domestik dan politik internasional, yang mana makna dari kedua hal tersebut tentu lah berbeda. Dalam Politik Domestik, negara memiliki kedaulatan yang membenarkan pihak penguasa untuk menegakkan kebijakan – kebijakannya terhadap individu yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Sedangkan dalam Politik Internasional, masing – masing negara berusaha untuk melanggengkan kedaulatannya.

Pada dasarnya, kedaulatan terikat pada satu set peraturan yang berdampak kepada negara sebagai pedoman bagaimana berinteraksi dengan yang lain, termasuk menolak segala bentuk campur tangan Negara lain ke dalam urusan dalam negeri. Dalam konteks manajemen keamanan nasional, kedaulatan berhubungan dengan bagaimana kemampuan kekuasaan umum yang terorganisir di dalam negara dan bagaimana pelaksanaannya secara efektif. Kekuasaan dan kontrol akan mempengaruhi tingkah laku sebuah

¹⁶ Witarti, Denik Iswardani. 2011. *Tinjauan Teoritis Mengenai Konsep Keamanan Nasional*. Dalam Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 6, hal 1 – 4

¹⁷ *Ibid.* Witarti, Denik Iswardani, hal. 4 – 11

negara. Dengan demikian, dapat dipahami mengapa negara yang memiliki kekuasaan besar kadang memilih bersikap satu pihak (unilateral).

2. Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Semua negara tentulah mempunyai kepentingan – kepentingan tersendiri yang dikenal sebagai kepentingan nasional. Setiap negara akan berusaha mempertahankan dan memajukan kepentingan – kepentingan negara masing-masing dalam menjalankan hubungan dengan negara – negara lain. Kepentingan nasional menjadi pilar dan rujukan untuk mengurus kehidupan bangsa dan negara. Kepentingan yang utama bagi sebuah negara selalu berhubungan dengan keberadaan yang hakiki bagi sebuah negara yakni wilayah, penduduk dan kedaulatan. Oleh karena itu, negara tidak akan kompromi dan merespon dengan tegas setiap ancaman yang mengganggu wilayah negaranya.

Masing – masing negara mendefinisikan kepentingan nasional dengan berbagai cara yang berbeda. Kepentingan nasional yang utama memiliki dua kategori. Pertama, kepentingan nasional ini sangat penting bagi negara yang mana tidak akan rela untuk kompromi. Kedua, sebuah negara-bangsa biasanya akan bersedia melakukan perang demi mencapainya.

Kemudian, kepentingan nasional ini dirumuskan menjadi strategi keamanan nasional. Strategi keamanan pada peringkat apapun terdiri dari objektif atau tujuan akhir (*ends*), konsep atau cara (*ways*), serta sumber daya yang dimiliki (*means*) untuk mencapainya. Apabila ketiganya dapat

dirumuskan kemudian diterapkan dengan benar maka pengaturan keamanan nasional dapat menjadi pemersatu kehidupan masyarakat.

Gagasan mengenai kepentingan nasional inilah yang hendak dikejar di dalam politik luar negeri oleh suatu negara. Pemerintah akan bertindak mengikuti kepentingan – kepentingan rakyatnya meskipun tidak sama atau bahkan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan negara lain.

Nampak jelas disini bahwa tingkah laku negara berasal dari adanya upaya untuk mengejar, melindungi dan memenuhi kepentingan nasionalnya masing – masing. Oleh karena itu, apabila sebuah negara dapat dengan tepat merumuskan kepentingannya, maka seharusnya negara tersebut dapat lebih memahami kelakuannya *vis-à-vis* negara lain dan pelaku – pelaku lain dalam sistem internasional.

3. Konsepsi Ancaman (*National Threats*)

Kenneth Waltz berpendapat bahwa masalah keamanan selalu mempunyai hubungan dengan upaya negara – negara untuk mencari keamanan, penggunaan kekuatan militer, perlombaan senjata dan perang. Hal ini didasari oleh adanya pandangan bahwa ancaman yang dihadapi oleh sebuah negara adalah ancaman militer. Namun, berakhirnya Perang Dingin munculnya ancaman-ancaman keamanan baru, berupa aspek non-militer mulai masuk dan dipertimbangkan sebagai isu yang dapat membahayakan keamanan.

Kofi Annan menyatakan bahwa ancaman yang seharusnya menjadi agenda PBB tidak saja terbatas kepada masalah terorisme internasional dan

pengembangan senjata-senjata pemusnah massal, tetapi lebih luas lagi termasuk juga fenomena mengenai kegagalan sebuah negara (*failure state*) yang dapat membawa ketidakstabilan dan konflik di kawasan, juga kepada masalah – masalah non-tradisional yang menjadi bagian dari isu perdamaian dan keamanan. Isu – isu tersebut diantaranya kemiskinan, degradasi lingkungan, penyakit yang merupakan pandemik, dan meluasnya jaringan kejahatan trans-nasional. Mereka menyebutnya sebagai '*soft-threat*', yang mana ancaman-ancaman itu dipandang lebih mengancam dan mematikan daripada ancaman fisik atau '*hard-threat*'.

Berikut adalah tabel agenda keamanan dalam arti luas yang memasukkan Lingkungan (*Enviroment*) Domestik dan Internasional baik aspek militer maupun non-militer. Faktor-faktor ini merupakan faktor yang dapat menyumbang sebagai penyebab konflik-konflik kekerasan, di antaranya ialah:

Tabel. 1. 1. *Landscape* Baru Keamanan

	Masalah <i>Interstate</i>	Masalah <i>Intarstate</i>	Masalah Transnasional
Tantangan Militer	Perang <i>Interstate</i>	Kudeta Militer	Pemberontakan lintas batas Terorisme Transnasional
	Kompetisi <i>Great-Power</i>	Konflik Etnik	Proliferasi senjata melalui atau kepada aktor non-negara
	Proliferasi senjata ke negara – negara/ kawasan yang tidak stabil	<i>Perang Sipil</i>	
Tantangan Non-Militer	Persengketaan Dagang	Pertumbuhan Populasi	Media Transnasional
	Konflik Sumber Daya	Migrasi Internasional	Kejahatan Transnasional
	Kompetisi Energi	Kompetisi Sumber Daya	Proliferasi teknologi

Sumber: Michael M. Brown. 2003. *Grave new world: Security Challenges in the 21st century*. Washington D.C: Georgetown University Press.

Tentunya persepsi mengenai ancaman yang dihadapi oleh sebuah negara sangatlah berpengaruh terhadap keamanan nasional. Sehingga dalam hal ini negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Negara juga merupakan aktor utama dalam proses sekuritisasi ancaman – ancaman non-militer yang membahayakan seluruh entitasnya.

4. Lingkungan (*Environment*) Domestik dan Internasional

Keamanan nasional, kawasan dan global saling berkaitan. Keamanan kawasan merupakan perpanjangan yang masuk akal dari keamanan nasional. Tindakan suatu negara di bidang keamanan dapat membawa dampak yang merumitkan baik bagi keamanan kawasan maupun keamanan global. Disamping itu, isu – isu keamanan yang ada seringkali di luar kekuasaan suatu negara untuk menyelesaikannya secara sendirian. Sebagai contoh,

ketidaksabilan politik domestik dapat melimpah (*spill over*) ke Negara – negara yang berbatasan dengannya. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi sebuah negara untuk senantiasa menjaga kestabilan politik dalam negerinya.

Sekjen PBB, Kofi Annan tahun 2005 yang bertajuk “*in larger freedom*” dinyatakan secara tegas bahwa ancaman terhadap perdamaian dan keamanan tidak saja perang internasional dan konflik melainkan kekerasan terhadap orang umum, kejahatan terorganisir, terorisme dan senjata pemusnah massal. Selain itu juga termasuk kemiskinan, penyakit yang mematikan dan degradasi lingkungan ketika mereka dapat menimbulkan akibat-akibat yang membawa bencana. Namun, persepsi ancaman, dalam menanggapi apakah suatu hal itu mendesak, berbeda di setiap negara. Hal tersebut tergantung kepada kekayaan, letak geografi dan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut.

Di era yang mana ancaman – ancaman terhadap keamanan nasional senantiasa berubah, isu-isu trans-nasional yang secara alami berpasangan dengan senjata – senjata yang tersembunyi dan berbahaya yang memiliki kemampuan memusnahkan, maka langkah ke depan yang mesti diambil ialah melalui kerjasama, bersiap, berjaga – jaga dan diplomasi yang kreatif. Panduan-panduan untuk menjaga keamanan dunia telah ada yaitu forum – forum politik, undang-undang internasional, kerjasama ekonomi, asset – aset intelijen, dan apabila diperlukan juga kekuatan militer.

1.5.2. *Threat Perception* (Persepsi Ancaman)

Threat perception merupakan teori yang berkaitan dengan perang, pencegahan dan pemaksaan, aliansi dan resolusi konflik. Thucydides menuliskan mengenai dasar dari penilaian ancaman dan perlunya keseimbangan dengan aliansi yang memiliki kekuasaan yang besar. Ancaman muncul dikarenakan adanya dua hal, *security dilemma* dan *status dilemma*. *Security dilemma* muncul antara dua negara yang sama – sama mencari keamanan bagi negaranya, dimana ketika salah satu negara mengambil langkah *defensive* hal ini akan dianggap sebagai tindakan *offensive* bagi negara lain, sehingga kemudian memicu adanya *misinterpretation* suatu negara atas tindakan *defensive* negara lain dapat memicu adanya ancaman yang kemudian memicu timbulnya perang. Sedangkan mengenai *status dilemma* terjadi saat dua negara dapat merasa yakin dengan status negara mereka. Hal tersebut dapat terwujud apabila negara memiliki informasi yang sempurna untuk saling percaya atas satu sama lain. Tanpa informasi tersebut, salah satu pemimpin negara berpikir bahwa status negaranya mendapatkan tantangan dari negara lain meskipun pada kenyataannya tidak demikian. Sehingga pemimpin negara tersebut kemudian megambil tindakan untuk mempertegas status negaranya, namun tindakan tersebut kemudian ditafsirkan sebagai ancaman bagi negara lain.¹⁸ Sehingga *threat perception* atau persepsi ancaman adalah sebuah keadaan di mana negara

18 Stein, Janice Gross. 2013. *Threat Perception in International Relations*. Oxford: Oxford University Press, hal. 5-6

mempersepsikan sebuah situasi sebagai situasi yang negatif dan merasakan perlunya melindungi negaranya.¹⁹

Ancaman antar kelompok secara umum sama dengan ancaman personal, yang membedakannya adalah bahwa ancaman yang dirasakan oleh individu berhubungan dengan kelompoknya. Sebuah ancaman terhadap kelompok dialami ketika anggota dari sebuah kelompok merasakan bahwa kelompok yang lain akan membahayakan mereka. Dalam konteks *intergroup threat theory*, Stephan, Ybarra dan Morrison mendefinisikan ancaman antar kelompok sebagai pengalaman dimana seorang individu mempersepsikan bahwa kelompok lain akan membahayakan diri atau kelompok mereka.

1. Tipe – tipe dari persepsi ancaman di antaranya ialah:²⁰

Berdasarkan Stephan, Ybarra dan Morrison, persepsi ancaman memiliki beberapa tipe, yaitu:

a. Ancaman Realistik (*Realistic Threat*)

Pada awalnya, ancaman realistik adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Levine dan Campbell dan dikenal dengan *realistic group conflict theories* (RGCT). Persepsi terhadap ancaman realistik bisa terjadi dalam dua level, yaitu level individu (personal) dan level kelompok. Pada level personal, ancaman realistik mengacu kepada ancaman yang berhubungan dengan fisik atau material yang nyata dan membahayakan individu seperti rasa sakit, siksaan, atau kematian, juga kerugian dalam

¹⁹ Stein, Janice Gross. 2013. *Threat Perception in International Relations*. Oxford: Oxford University Press

²⁰ *Ibid.* Janice Gross Stein

bidang ekonomi, dan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan individu. Pada level kelompok, individu melihat ancaman sebagai sesuatu yang dapat membahayakan keberadaan kelompok.

b. Ancaman Simbolik (*Symbolic Threat*)

Ancaman simbolik adalah ancaman yang berhubungan dengan agama, nilai-nilai, kepercayaan, ideologi, falsafah, moralitas, juga identitas sosial dan harga diri dari individu atau kelompok. Persepsi terhadap ancaman simbolik adalah bagaimana cara hidup dari individu atau kelompok luar bisa mengancam individu atau kelompoknya.

c. Kecemasan Antar Kelompok (*Intergroup Anxiety*)

Kecemasan antar kelompok yang melibatkan antisipasi terhadap interaksi antar kelompok yang negatif awalnya merupakan jenis ancaman yang terpisah. Namun, berdasarkan revisi terakhir menurut Stephan, Ybarra dan Morrison kecemasan antar kelompok dikelompokkan sebagai sub bagian dari ancaman antar kelompok yang berpusat pada kekhawatiran pada interaksi dengan anggota outgroup. Kekhawatiran ini muncul dari berbagai sumber yang berbeda, termasuk diantaranya kekhawatiran bahwa outgroup akan memanfaatkan ingroup, dan kekhawatiran bahwa outgroup akan mempersepsikan ingroup berprasangka.

Tipe ancaman ini, berorientasi pada emosi, yang muncul dari kekhawatiran pada diri sendiri, baik karena individu takut terhadap konsekuensi perilaku atau psikologis, atau karena mereka takut terhadap evaluasi dari anggota ingroup atau outgroup.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Ancaman:²¹

Berdasarkan Stephan, Ybarra & Morrison, terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi persepsi ancaman, di antaranya ialah:

a. Hubungan antar kelompok (*Intergroup relation*)

Bagaimana hubungan antara kelompok yang satu dengan yang lain bisa mempengaruhi ancaman. Kekuatan kelompok, sejarah konflik, juga besar anggota kelompok merupakan faktor-faktor yang berperan dalam hubungan antar kelompok ini.

b. Dimensi budaya (*Cultural dimension*)

Dimensi budaya mengacu pada nilai-nilai, standar, peraturan, norma-norma, dan kepercayaan pada satu kelompok dengan kelompok yang lain. ketika perbedaan pada hal-hal tersebut semakin mencolok, maka ancaman yang muncul pada masing-masing kelompok akan semakin meningkat.

c. Faktor situasional (*Situational factor*)

Faktor-faktor situasional seperti setting dimana interaksi antar kelompok berlangsung, bagaimana interaksi terjadi, juga tingkat dimana norma – norma hadir diantara masing – masing kelompok, tujuan dari interaksi, dan situasi kooperatif atau kompetitif dari interaksi bisa mempengaruhi persepsi ancaman yang terjadi antar kelompok. Bagaimana tingkah laku individu ketika interaksi terjadi mempengaruhi hal ini.

^{21 21} *Ibid.* Janice Gross Stein

d. Perbedaan individu (*Individual differences*)

Individu yang kurang memiliki kontak personal dan cenderung asing dengan kelompok luar juga memiliki self esteem yang rendah akan cenderung lebih merasa terancam ketika berinteraksi dengan kelompok luar.

3. Adapun konsekuensi dari ancaman itu sendiri ialah:²²

Intergroup threat bisa menyebabkan munculnya konflik. Hal ini dikarenakan ancaman mempengaruhi perilaku, persepsi, dan emosi. Sebuah ancaman dapat membangkitkan emosi negatif yang kuat termasuk didalamnya rasa takut, marah, benci, frustrasi, dan rasa tidak aman. Selain itu, persepsi ancaman bisa mengurangi rasa empati pada anggota dari kelompok luar. Stephan, Ybarra dan Morrison membagi respon individu terhadap ancaman menjadi tiga, yaitu:

a. Respon Kognitif (*Cognitive response*)

Respon kognitif terhadap ancaman mencakup perubahan persepsi pada kelompok luar, seperti perubahan dalam stereotip terhadap kelompok luar. Stereotip ini, seperti stereotip pada umumnya didasarkan pada atribut yang dipercayai oleh individu dimiliki oleh kelompok luar. Stereotip negatif terhadap kelompok luar ini akan meningkat seiring dengan sikap negatif yang dimiliki oleh ingroup terhadap outgroup.

b. Respon Emosional (*Emotional response*)

Respon emosional terhadap ancaman kemungkinan akan menjadi negatif. Individu akan menjadi takut, cemas, marah, dan benci. Individu akan

^{22 22} *Ibid.* Janice Gross Stein

menjadi gelisah dan canggung ketika berhadapan dengan kelompok luar karena adanya ketidakpastian tentang bagaimana seharusnya bersikap dihadapan mereka. semakin individu merasa cemas terhadap kelompok luar, semakin ia akan mengantisipasi reaksi negatif dari kelompok luar. Kecemasan emosional bahkan bisa terjadi ketika individu salah memprediksi respon kelompok luar.

c. Respon perilaku (*Behavioral response*)

Respon perilaku yang muncul sebagai akibat dari ancaman berkisar dari menarik diri, diskriminasi, berbohong, menipu, mencuri, mengganggu, dan berbagai respon konflik lainnya. Reaksi behavioral yang muncul secara garis besar berorientasi kepada mendekati (*approach*) sumber ancaman (agresi) atau menghindari (*avoidance*) sumber ancaman.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah metode kualitatif dengan bentuk deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah atau *natural setting*, sehingga metode penelitian alamiah ini sering disebut sebagai metode naturalistik.²³

²³ Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeth. Hal. 1-5

1.6.2. Variabel Penelitian dan Level Analisis

Unit analisa adalah bagian yang hendak dideskripsikan, ramalkan dan jelaskan, sehingga unit analisa disebut juga sebagai variabel dependen. Sedangkan unit eksplanasi yakni bagian yang memberikan dampak pada unit analisa, sehingga unit eksplanasi disebut dengan variabel independen.²⁴

Dalam penelitian ini, unit analisa yang digunakan penulis ialah negara-bangsa yakni mengenai hegemoni Rusia di Eropa Timur pada masa pemerintahan Vladimir Putin tahun 2000 – 2008, sedangkan untuk unit eksplanasinya yang mempengaruhi unit analisa dengan berupa sistem regional dan global berupa implikasi perluasan keanggotaan NATO di Eropa Timur. Berdasarkan unit analisa dan unit eksplanasi yang digunakan peneliti, adapun tingkat analisa yang sesuai berdasarkan tabel variabel penelitian diatas yang sesuai ialah analisa induksionis di mana unit eksplanasinya pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan unit analisisnya.

1.6.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Yang mana data sekunder diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka, yaitu penelusuran literatur data kepustakaan dari berbagai terbitan resmi yang terdiri dari buku, jurnal, majalah dan surat kabar, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁴ Moctar Mas, oed. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disipln dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, hal. 35

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan adalah melalui teknik telaah pustaka dengan mengumpulkan data sekunder berupa literatur, jurnal, buku-buku dan berita melalui media elektronik maupun cetak. Selain itu penulis menggunakan data sekunder lainnya berupa data resmi dari website NATO dan juga jurnal dan buku – buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan metode analisis data yang dikembangkan oleh John W. Creswell. Metode analisis Creswell ini dapat dijabarkan dalam langkah – langkah berikut:²⁵

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis
2. Membaca keseluruhan data
3. Menganalisis lebih detail dengan mengolah data
4. Menerapkan proses pengolahan data untuk mendeskripsikan setting
5. Mendeskripsikan kembali tema – tema dalam narasi atau laporan kualitatif
6. Menginterpretasikan atau memaknai data

²⁵ Creswell, John W., 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta , hal. 276 - 284

1.7. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi Rusia di kawasan Eropa Timur pada masa pemerintahan Vladimir Putin pasca adanya perluasan keanggotaan NATO dengan bergabungnya tiga Negara Baltik. Dengan cara melihat hubungan kerja sama diantara Rusia dengan tiga Negara Baltik.

1.8. Manfaat Penelitian

1.8.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi para mahasiswa Hubungan Internasional pada khususnya dan pemerhati masalah – masalah internasional pada umumnya mengenai kajian wilayah Eropa Timur, khususnya mengenai Implikasi Perluasan Keanggotaan NATO Terhadap Eksistensi Rusia di Eropa Timur Pada Masa Pemerintahan Vladimir Putin Tahun 2000 – 2008.

1.8.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dan tambahan referensi bacaan, sumber informasi dan bahan kajian lebih lanjut dalam studi Hubungan Internasional bagi peneliti yang memiliki objek kajian yang serupa.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Bab 1, merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab 2, merupakan tinjauan pustaka yang memuat penelitian terdahulu berupa jurnal-jurnal yang digunakan sebagai acuan dan referensi dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, serta memaparkan keunikan dari penelitian ini.
3. Bab 3, merupakan pembahasan mengenai perluasan keanggotaan NATO di wilayah Eropa Timur, dengan bergabungnya Latvia, Lihuania, Estonia, dan Georgia turut bergabung dengan keanggotaan NATO
4. Bab 4, merupakan analisa mengenai implikasi perluasan keanggotaan NATO terhadap eksistensi Rusia di kawasan Baltik pada masa pemerintahan Vladimir Putin tahun 2000 - 2008
5. Bab 5, merupakan kesimpulan yang berisi mengenai kesimpulan atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu bermanfaat dalam menganalisa urgensi masalah yang bersinggungan dengan penelitian ini. Pembahasan mengenai eksistensi Rusia di wilayah Eropa Timur khususnya wilayah Baltik, serta ekspansi NATO di wilayah Baltik merupakan kajian yang sangat menarik dalam studi hubungan internasional. Oleh sebab itu, banyak sekali tulisan mengenai kajian tersebut. Berikut merupakan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan berkaitan dengan masalah Rusia dengan negara – negara di Eropa Timur, yaitu *Dampak Perluasan Keanggotaan NATO terhadap Hubungan NATO-Rusia* oleh Mira Permatasari.²⁶

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dengan runtuhnya Uni Soviet dan Pakta Warsawa menjadikan NATO merubah kebijakannya untuk lebih inklusif dengan pihak Timur, serta menjadikan NATO sebagai pakta pertahanan satu – satunya, dengan begitu selain melakukan ekspansi ke pihak Timur, di saat yang bersamaan NATO juga membangun kemitraan dengan negara – negara tetangga yang berbatasan langsung ataupun tidak, dan juga yang dinilai memiliki kepentingan strategis yang sama dalam bidang keamanan dan pertahanan. Hal ini dilakukan guna untuk menciptakan tatanan pertahanan dan keamanan yang

²⁶ Permatasari, Mira. 2011. *Dampak Perluasan Keanggotaan NATO terhadap Hubungan NATO-Rusia*. Universitas Pertahanan Indonesia